

IKHTISAR

ASIH. Persepsi Masyarakat Tentang Urgensi Surat (Akta) Cerai Bagi Wanita
(Penelitian di Desa Gunung Jaya, Kec. Cisaat- Sukabumi)

Perceraian adalah perbuatan dibenci Allah, akan tetapi dalam suatu perkawinan tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, adakalanya terjadi juga salah paham antara suami isteri, maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga, Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi mereka. Dengan perceraian seorang wanita memerlukan surat keterangan statusnya dimasyarakat yang hanya bisa didapat dari pengadilan yang berbentuk akta cerai.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi surat (akta) cerai bagi wanita tentang kejelasan status. Disamping itu untuk menjelaskan fungsi surat (akta) cerai hubungannya dengan kekuatan hukum dan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang fungsi surat (akta) cerai bagi wanita.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran Bahwa sumber hukum adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk memahami kandungan hukum, kedua sumber itu dilakukan dengan berbagai metode istimbath al-Ahkam. Dikalangan ulama dikenal berbagai metode, diantaranya yaitu metode Maqashid al-Syari'ah.

Teknik penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan dengan beberapa pertimbangan pertama menyesuaikan. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pentajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel ada 11 (sebelas) orang diantaranya masyarakat yang bekerja di KUA, Ulama Desa, dan Wanita-wanita yang pernah bercerai.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ada persamaan pendapat masyarakat tentang urgensi surat (akta) cerai bagi wanita, meliputi kejelasan status wanita, kekuatan hukum dalam hal kepegawaian dan kewarisan. Masyarakat menganggap penting adanya surat (akta) cerai, karena akan menjadi bukti tertulis bagi yang bercerai. Perbedaan dalam hal sah tidaknya cerai diluar pengadilan. Persamaan pendapat itu karena kesamaan dalam pengambilan sumber hukum dan dalam hal kemaslahatan yang ditimbulkan dari surat (akta) cerai itu, perbedaan pendapat itu karena tingkat pendidikan yang berbeda diantara mereka dan keterbatasan pengetahuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat bahwa dalam hal sah tidaknya cerai diluar pengadilan itu karena satu pihak lebih konsekuen dengan hukum syara' tentang perceraian, satu pihak lagi selain berpegang kepada hukum syara' merekapun tidak bisa lepas dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ulil Amri), mereka berpendapat bahwa perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.